

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad, Beni Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amirudin, Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badan Pembina Hukum, Mabes TNI, *Buku Saku Prajurit*, Edisi Maret 2006.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Indonesia, 1984, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeven.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Mabes TNI AD. 2007. *Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 31 TH. 1997)*, Magelang: Akademi Militer.
- Mabes TNI AD. 2007. *Hukum Disiplin Prajurit*, Magelang: Akademi Militer.
- Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Pasal 21 *Buku Saku Prajurit*, Edisi Maret 2006.
- Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Pasal 1 angka 3, *Hukum Disiplin Militer*, Edisi 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco.
- Saadi, Anwaar, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salam, Moch Faisal. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R. 1981. *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syahrani, Ridhuan. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tambunan, ASS. 2005, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM.

Jurnal Ilmiah/Karya Ilmiah

- Purba, Iman Pasu Marganda Hardiato. 2017. *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, 2, Oktober 2017.
- Sagala, Parluhun Mayor Corps Hukum. Hakim Militer Gol. V Dilmil I-04 Palembang, Juli 2016, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Dilmiltama.

Simanggunsong, Jimmy. 2015. *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*.

Sulistiriyanto, Haryo. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, 2, April 2011.

Website/Internet

Berita satu, (7 April 2016), Dandim Makassar Ditangkap Sedang Pesta Narkoba, diakses dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/358775-dandim-makassar-ditangkap-sedang-pesta-narkoba.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul: 20.00 WIB.

Wikipedia, (9 Desember 2017), Peradilan Militer di Indonesia, diakses dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_militer_di_Indonesia, diakses pada tanggal 3 April 2018, pukul: 17.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169),

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kepmenkes RI No 194 Tahun 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika,

Wawancara Pribadi

Kapten CPM Nyono, Perwira Seksi Penyidikan Detasemen Polisi Militer V/1 Madiun, Wawancara Pribadi, Madiun, 22 Maret 2018, Pukul 10:00 WIB.

Letkol CHK Moch Suyanto, Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun,
Wawancara Pribadi, Madiun, 26 Maret 2018, pukul 10:00 WIB

Mayor CHK Asmawi, Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun, *Wawancara Pribadi*, Madiun, 17 Mei 2018, pukul 10:00 WIB.

Mayor SUS Wing Eko Joedha, Wakil Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun,
Wawancara Pribadi, Madiun, 26 Maret 2018, pukul 11:00 WIB.